

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu oleh penelitian lain, sehingga objek penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan.

1. Erliyanti et al. (2022)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang keuangan pada 41 SKPD di Kabupaten Balangan dan terdapat 287 auditor Kabupaten Balangan. Sampel penelitian ini berjumlah 138 orang yaitu 123 orang dari 3 responden masing-masing SKPD dan auditor berjumlah 15 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data dengan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda SPSS versi 25. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintahan, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan.

Persamaan Penelitian:

- a. Teknik pengumpulan data peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan kuesioner
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan responden dari ASN

Perbedaan Penelitian:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal pemerintahan sedangkan penelitian saat ini menggunakan pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi
- b. Sampel yang digunakan menggunakan penelitian terdahulu menggunakan seluruh SKPD sedangkan penelitian yang sekarang di BPPKAD

2. Kuntadi et al. (2022)

Tujuan penelitian ini untuk melihat faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan: pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian kompensasi. Penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di bidang Keuangan Negara. Penulisan artikel ilmiah ini juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi maupun yang belum bereputasi dan sitasi bersumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kompetensi sumber daya manusia dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Persamaan Penelitian :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan responden dari ASN
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi

Perbedaan Penelitian :

- a. Peneliti sekarang menggunakan pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi sedangkan peneliti terdahulu tidak
- b. Peneliti sekarang menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif.
- c. Peneliti sekarang menggunakan uji dengan PLS sedangkan peneliti terdahulu menggunakan studi literatur

3. Dasuki et al. (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif teknik. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Majalengka yang berjumlah 70 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling atau jenuh sampel, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada seluruh sampel. Alat analisis yang digunakan dalam hal ini penelitian adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien

analisis determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kabupaten Majalengka.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi.

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan kecenderungan kecurangan sebagai variable dependen. Pada peneliti sekarang menggunakan pencegahan kecurangan akuntansi sebagai variable independen
- b. Peneliti terdahulu menggunakan SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan PLS

4. Indrapraja et al. (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menilai organisasi karakteristik seperti gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, serta faktor manusia seperti dedikasi organisasi dan religiusitas, dalam rangka melindungi Aparatur Sipil Negara terhadap penipuan (ASN). Populasi dalam penelitian ini adalah (ASN) Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 15.455. Kuesioner dikumpulkan dengan cara mengirimkan kuesioner secara langsung dan ada pula yang mengirimkan kuesioner.

Sebanyak 104 PNS berpartisipasi dalam penelitian ini dan 100 kuesioner diproses. Hasil regresi berganda analisis dengan bantuan SPSS 27 menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan ASN pemerintahan di Provinsi Riau. Namun, gaya kepemimpinan dan religiusitas tidak memiliki pengaruh pada kecurangan. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi untuk pemerintah dalam mengurangi terjadinya kecurangan.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan responden dari ASN
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan data primer (kuesioner)

Perbedaan Penelitian:

- a. Variabel independen dan dependen peneliti terdahulu dan sekarang berbeda.
- b. Sampel peneliti ASN di BPPKAD Kabupaten Sampang sedangkan, peneliti terdahulu seluruh ASN Pemerintahan Provinsi Riau.

5. Andreas et al. (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, pengembangan mutu karyawan, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan efektivitas sistem pengendalian sebagai variable pemoderasi.

Penelitian ini dilakukan di perbankan BUMN yang ada di kota Pekanbaru dengan sampel pegawai back office sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan daftar kuesioner. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis*

(MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, pengembangan mutu karyawan, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian, efektivitas sistem pengendalian internal hanya memoderasi gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian maka variabel efektivitas pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan data primer melalui survey lapangan.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengembangan mutu karyawan.

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti sekarang menggunakan ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi sedangkan, peneliti terdahulu tidak.
- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah perusahaan BUMN dibidang Perbankan sedangkan peneliti sekarang menggunakan ASN yang berada di BPPKAD.

6. Sari et al. (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kepuasan kerja dan moralitas manajemen terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan kausal komperatif dengan teknik kuesioner sebagai pengumpulan data. Sampel penelitian ini terdiri dari 75 karyawan pada divisi finance accounting dan tax di kantor PT.KJC. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi dan terdapat pengaruh yang signifikan antara moralitas manajemen terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama berupa kuesioner
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan Variabel independen pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi
- c. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel dependen pencegahan kecurangan akuntansi

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel kepuasan kerja dan moralitas manajemen sedangkan peneliti sekarang tidak.

- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu ialah 75 karyawan di divisi finance accounting and tax di kantor PT.KJC. Sedangkan, sampel peneliti sekarang karyawan di BPPKAD Kabupaten Sampang.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan metode analisis linier berganda. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan *PLS*.

7. Novitasari et al. (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh persepsi karyawan mengenai keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi finansial serta non finansial terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada para karyawan) di PT X yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Populasi karyawan pada bagian *Shared Service Operation Finance* (SSOF) di PT X berjumlah 72 karyawan. Sehingga dilakukan teknik sampling berdasarkan populasi tersebut, menghasilkan 61 karyawan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 24*. Hasil penelitian menunjukkan persepsi karyawan mengenai keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi finansial serta non finansial berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner.

- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel dependen pencegahan kecurangan akuntansi

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti sekarang menggunakan pengembangan mutu karyawan dan ketaatan akuntansi sedangkan peneliti terdahulu tidak.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel pada PT X yang merupakan salah satu BUMN sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel ASN di Instansi BPPKAD.

8. Dewi et al. (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada desa di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 129 desa dan sampel penelitian sebanyak 56 desa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan *skala likert*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan sedangkan Integritas, komitmen organisasi dan pengendalian internal kas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Persamaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode kuantitatif.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner.
- c. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengendalian internal.
- d. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel dependen pencegahan kecurangan akuntansi.

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variable moralitas, integritas, komitmen organisasi sebagai variable independen, sedangkan peneliti sekarang tidak.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel 56 desa di Kabupaten Buleleng sedangkan peneliti sekarang menggunakan karyawan BPPKAD Kabupaten Sampang.

9. Azzahra (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas aparat, dan implementasi *corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Sampel pada penelitian ini berjumlah 50 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas aparat dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Persamaan Penelitian :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode kuantitatif
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner.
- c. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel independen pengendalian internal
- d. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan variabel dependen pencegahan kecurangan

Perbedaan Penelitian:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variable moralitas aparat dan implementasi *corporate governance* tetapi, peneliti sekarang tidak.
- b. Sampel dari peneliti terdahulu di 15 SKPD salah satunya BPKAD di Kota Tangerang sedangkan sampel peneliti sekarang hanya di instansi BPPKAD Kabupaten Sampang.

10. Ndege Joseph et al. (2015)

Tujuan penelitian ini untuk memastikan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan dan deteksi penipuan kas di daerah Kakamega, Kenya. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang dirancang dan disebarakan kepada para staf

treasury dan klien. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan inferensial statistik menggunakan SPSS. Pengumpulan data kuesioner juga melalui uji reliabilitas dan validitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif secara statistik antara kecukupan pengendalian internal dan kecurangan pencegahan dan pendeteksian di kas daerah Kakamega.

Persamaan Penelitian:

- a. Variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan pengendalian internal
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner.

Perbedaan Penelitian:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel di daerah Kakamega, Kenya sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel responden BPPKAD Kabupaten Sampang.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan alat statistik SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan PLS.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
1.	Erliyanti et al. (2022)	Pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan: partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap <i>good governance</i> pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan	Independen: Pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan: partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal (SPIP) dan gaya kepemimpinan Dependen: Terhadap <i>good governance</i> pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan.	Sampel penelitian ini berjumlah 138 orang yang terdiri dari 123 orang dari 3 responden masing-masing SKPD dan untuk auditor berjumlah 15 orang.	analisis regresi berganda dan SPSS versi 25	Kompetensi Aparatur Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal (SIPS) berpengaruh terhadap <i>good governance</i> , sedangkan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap <i>good governance</i> .
2.	Kuntadi et al. (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem	Independen: Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia,		Kualitatif atau studi literatur	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Kompetensi

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
		Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi	Kesesuaian Kompensasi Dependen: Kecenderungan Kecurangan.			Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam
3.	Dasuki dan Yudawati (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka)	Independen: Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pegawai SKPD Kabupaten Majalengka, berjumlah 70 orang	analisis deskriptif dan verifikatif teknik	Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka)

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
4.	Indrapraja et al. (2021)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (fraud) Aparatur Sipil Negara	Independen: Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Religiusitas Dependen: Kecurangan (fraud) Aparatur Sipil Negara	Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 15.455.	Analisis regresi linier	Gaya kepemimpinan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan ASN Pada Pemerintah Provinsi Riau. Budaya organisasi dan kompetensi berpengaruh terhadap Kecurangan ASN Pada Provinsi Riau.
5.	Andreas et al. (2020)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Mutu Karyawan, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan: Efektivitas Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada	Independen: Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Mutu Karyawan, dan Budaya Organisasi Dependen: Pencegahan Kecurangan: Efektivitas	Pegawai black office 100 orang	Analisis linear berganda dan MRA	Gaya kepemimpinan, pengembangan mutu karyawan, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. kemudian efektivitas sistem pengendalian internal hanya memoderasi gaya kepemimpinan dan budaya organisasi

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
		Perbankan BUMN di Pekanbaru)	Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi			terhadap pencegahan kecurangan. dengan demikian maka variabel efektivitas pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan
6.	Sari et al. (2021)	Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kepuasan kerja dan moralitas manajemen terhadap pencegahan kecurangan akuntansi pada perusahaan jasa kebersihan PT.KJC	Independen: Pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kepuasan kerja, dan moralitas manajemen. Dependen: Pencegahan kecurangan.	75 responden	Teknik analisis data analisis regresi linier berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pencegahan kecurangan akuntansi. Dan terdapat pengaruh yang signifikan antaran moralitas manajemen

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
						terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.
7.	Novitasari dan Kusumastuti (2019)	Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Finansial serta Non Finansial terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi	Independen: Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Finansial serta Non Finansial Dependen: Pencegahan Kecurangan Akuntansi	61 karyawan	Uji regresi linier berganda	Persepsi karyawan mengenai keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi finansial serta non finansial berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
8.	Dewi et al. (2017)	Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng	Independen: Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Dependen: Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Sampel penelitian sebanyak 56 desa.	Teknik analisis linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t	Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud), sedangkan Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud)
9.	Azzahra et al. (2021)	Pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas aparat, dan implementasi corporate	Independen: Sistem pengendalian internal, moralitas aparat, dan	15 SKPD Kota Tangerang	Teknik analisis linier berganda	Sistem pegendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan

No.	Author	Judul	Variabel	Sampel	Teknik analisis	Hasil penelitian
		terhadap pencegahan kecurangan	implementasi corporate Dependen: Pencegahan kecurangan	dari 3 instansi	dan uji hipotesis menggunakan uji t	kecurangan. Moralitas aparat dan corporate governance tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
10.	Ndege Joseph et al. (2015)	pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan dan deteksi penipuan dikas daerah Kakamega	Independen: pengendalian internal Dependen: pencegahan dan deteksi penipuan	terdapat 31 responden kunci yang dijadikan sampel dari 122 populasi Untuk mendapatkan ukuran sampel yang optimum	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif secara statistik antara kecukupan sistem pengendalian internal dan kecurangan pencegahan dan pendeteksian di kas daerah Kakamega

Tabel 2.2
Ringkasan Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	X1	X2	X3	X4	Y
1.	Erliyanti,Rahma Yuliani, Hamdani (2022)	B				Pencecahan K ecurasan akuntansi
2.	Cris Kuntadi,Bhayu Adi Puspit, Achmad Taufik (2022)	B				
3.	Tito Marta,Sugema Dasuki, Yunar Yudawati (2021)	B		B	B	
4.	M. Haykal Daditullah Indrapraja, Restu Agusti, Nanda Fito Mela (2021)		TB			
5.	Rezca Setiawan, Andreas Nasrizal (2020)	TB	B			
6.	Ni Made Dwita Sari,Sofyan Bantasyam, Ameilia Damayanti (2021)	B		B		
7.	Dinda Novitasari, Endah Dwi Kusumastuti (2019)	B			B	
8.	Putu Feny Kharisma Dewi, Gede Adi Yuniarta, Made Arie Wahyuni (2017)	B				
9.	Hielnanda Yasmin Azzahra,Reni Yendrawati (2017)	B				
10.	Oguda Ndege Joseph ,Odhiambo Albert (2015)	B				

Keterangan:

(X1) : Pengendalian Internal

(X2) : Pengembangan Mutu Karyawan

(X3) : Ketaatan Aturan Akuntansi

(X4) : Kesesuaian Kompensasi

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

1. Teori keagenan

Agency theory merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan menurut Megasari (2015:132), dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi tentang alam manusia, asumsi organisasi dan asumsi informasi. asumsi sifat manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri *self interest*, memiliki keterbatasan rasionalitas *bounded rationality* dan tidak menyukai risiko *risk aversion*. Asumsi organisasi adalah kontradiksi anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri Informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi merupakan informasi yang dapat digunakan sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Dalam susunan pemerintahan, hubungan antara keagenan juga terjadi dalam hal sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Supaya terhindar dari tindakan yang merugikan, maka perusahaan maupun instansi pemerintahan harus melakukan pengawasan dengan melakukan pencegahan kecurangan. Pencegahan tersebut

diharapkan mampu menekan terjadinya masalah yang disebabkan oleh pihak yang kecenderungan mememtingkan diri sendiri (*self interest*) seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan demikian hal tersebut termasuk dalam tindakan pencegahan kecurangan akuntansi.

2. Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud triangle* merupakan gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan pertama diciptakan oleh Donald R.Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. Terdapat tiga faktor yang ada dalam setiap situasi *fraud* yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi.

a. Tekanan

Tekanan merupakan macam-macam gaya hidup dan tuntutan ekonomi. Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) berpendapat bahwa terjadi tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan yang terjadi pada empat jenis kondisi yaitu: *Financial stability* merupakan suatu keadaan dimana kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan stabil. Contohnya faktor dari resiko perusahaan yang melakukan manipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh suatu kondisi ekonomi.

Financial target merupakan suatu tekanan yang berlebihan pada suatu manajemen untuk mencapai sebuah target keuangan. Contohnya faktor resiko perusahaan melakukan manipulasi laba untuk memenuhi patokan para analisis seperti laba ditahun sebelumnya.

External pressure merupakan sebuah tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga.

Contohnya faktor risiko, ketika suatu perusahaan menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis yaitu tekanan untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya.

Personal financial need merupakan kondisi keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contohnya faktor risiko, kepentingan keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam perusahaan, manajemen memiliki bagian kompensasi signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang tinggi untuk harga saham, hasil operasi, posisi keuangan atau arus kas manajemen yang menjaminkan harta pribadi untung utang perusahaan.

b. Peluang

Peluang atau kesempatan yang merupakan sebuah kesempatan manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan Arens (2015: 398). Peluang tercipta karena adanya kelemahan didalam pengendalian internal ataupun ketidakefektifan pengawasan dalam manajemen seperti penyalahgunaan otoritas dan tanggungjawab. Widawati et al. (2019) berpendapat bahwa peluang yang ada pada *financial statement fraud* dapat terjadi di tiga kategori yaitu:

Nature of Industry adalah munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Contoh faktor risiko, penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan yang

persediaanya tersebar dibanyak lokasi, risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan menjadi usang.

Innefective monitoring adalah keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efektif memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor risiko, adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi maupun komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

Organixation structure adalah struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil. Contoh faktor risiko, struktur organisasi yang terlalu kompleks, perputaran personil perusahaan seperti senior manajer atau direksi yang tinggi.

c. Rasionalisasi

Menurut Suwena (2021) bahwasannya rasionalisasi menyebabkan pelaku tindakan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionlisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Banyak para pelaku korupsi yang telah ditangkap, namun tidak satupun menyangka akan ditangkap dan berpikir bahwa akan lolos dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dengan merasionalisasi apa yang mereka lakukan, percaya bahwa mereka tidak akan dihukum dan mengakibatkan perilaku yang tidak etis.

3. Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Pencegahan kecurangan merupakan upaya integrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur

reintegrasi yang dapat menekankan terjadinya faktor penyebab kecurangan, menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan dan menghalangi terjadinya kecurangan.

Adapun tujuan pencegahan kecurangan akuntansi pada Pusdiklatwas BPKP adalah sebagai berikut:

1. *Prevention*, untuk memperkecil peluang terjadinya sebuah kecurangan dan mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence*, untuk menangkai pelaku potensial atau tindakan yang bersifat coba-coba, menurunkan tekanan pada pegawai.
3. *Disruption*, merupakan cara agar mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan dan meminimalisasi alasan atas apa membenaran tindakan kecurangan yang dilakukan.
4. *Identification*, merupakan tindakan mengidentifikasi sebuah kegiatan yang memunculkan resiko kecil maupun besar dan kelemahan pengendalian. Serta meminimalisasi alasan atau membenaran dari tindakan kecurangan yang dilakukan.
5. *Civil action Protection*, merupakan sebuah tindakan berupa penjatuhan sanksi atau tuntutan atas perbuatan kecurangan kepada pelaku.

Untuk mengendalikan pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahan, BPKP dalam PP No.60 menjelaskan bahwa upaya dalam pencegahan kecurangan telah dilakukan secara intensif, kerentanan didalam organisasi pemerintahan dapat dipelajari seperti bagaimana penyimpangan terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana kecurangan terdeteksi dan sebagainya. Dengan demikian dapat

mengetahui tindakan apa yang diambil untuk memaksimalkan kemampuan organisasi untuk melindungi terjadinya sebuah kecurangan.

Sebuah kecurangan umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan pegawai yang terlihat jujur sekalipun bisa saja melakukan kecurangan. Seperti yang dijelaskan oleh BPKB bahwa kunci untuk mencegah dan mendeteksi sebuah kecurangan dengan melakukan penerapan model penangkal multisegi *organization-wide model of deterrence*. Model ini melibatkan tiga komponen yang dapat memaksimalkan kesempatan organisasi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yaitu: pengendalian keuangan, sistem nonkeuangan, pengawasan dan perilaku manajemen. Menurut Wahyuni Neny (2017), menjelaskan bahwa terdapat indikator-indikator dalam pencegahan kecurangan yaitu:

1. Kesadaran akan adanya kecurangan dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari terjadinya kecurangan akuntansi. Menerapkan hukuman dan meningkatkan kesadaran dan peningkatan budaya kerja yang sehat tanpa adanya kecurangan akuntansi.
2. Menilai risiko terjadinya kecurangan merupakan suatu penilaian terhadap masalah yang kurang menyenangkan, terdapat sisi akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau dalam prosesnya.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal perlu diterapkan di sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut Sabella (2014) dalam

arti sempit pengendalian internal merupakan suatu prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian dari data, misalnya memeriksa kebenaran dengan cara mencocokkan. Jika pengendalian internalnya lemah maka kecurangan akuntansi semakin besar. Namun, jika pengendalian internal dalam suatu instansi atau organisasi itu kuat dapat menurunkan tingkat kecurangan akuntansi. Menurut Nainggolan (2018) tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, efektifitas dan efisiensi.

Menurut Raharjo et al. (2021) pengendalian internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh sejumlah jajaran pimpinan, manajemen, staf serta personil lainnya, dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak dalam hal pencapaian objektivitas dalam keefektifan serta efisiensi operasi untuk memperoleh kepercayaan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam peraturan KEMENDAGRI menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal menurut peraturan pemerintahan SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan SPIP tidak hanya bergantung pada rancangan pengendalian yang cukup untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi tersebut juga sebagai faktor penentu yang dapat membuat pengendalian berfungsi dengan baik. Peraturan pemerintah SPIP menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi di instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil tentang pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
2. Penilaian resiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti

Pengendalian internal yang efektif dapat digunakan instansi untuk melindungi dari korupsi, penggelapan, penyalahgunaan aktiva. Selain itu pengendalian internal dapat digunakan untuk memberikan jaminan informasi yang lebih akurat kepada pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, jika pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dapat diandalkan untuk melindungi dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari pengertian-pengertian diatas pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Menurut Suharso (2016), mengungkapkan keterbatasan pengendalian internal yang mungkin terjadi karena:

1. Penetapan tujuan sebagai prasyarat pengendalian internal tidak tepat
2. Pengambilan keputusan oleh manusia yang salah satu bias
3. Kesalahan dari faktor manusia sebagai pelaksana pengendalian
4. Kemampuan manajemen mengesampingkan pengendalian

5. Kemampuan manajemen, personil lain, atau pihak ketiga untuk berkolusi
6. Peristiwa eksternal di luar kendali organisasi

5. Pengembangan Mutu Karyawan

Menurut Sri Larasati (2018) mendefinisikan pengembangan adalah suatu upaya peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan mutu karyawan dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih keras dan berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi karenanya akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien.

Tujuan dari pengembangan mutu karyawan yaitu mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Pengembangan mutu karyawan merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahliannya bekerja lebih baik, berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi dan karenanya akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien. Pengembangan mutu karyawan dapat diukur dan dibentuk melalui:

1. Pengembangan pengetahuan

Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan intelektualitas dari karyawan, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti memberikan sekolah ataupun kuliah bagi karyawan dan mengadakan *programmed instruction* bagi karyawan terhadap hal-hal baru yang berkembang mengenai perusahaan.

2. Pengembangan keterampilan

Proses pengembangannya dilakukan dengan pemberian latihan atau praktik langsung kepada karyawan, yang dimana metode pengembangan yang digunakan seperti diskusi kasus, studi proyek

3. Pengembangan sikap

Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan sifat emosional, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti melakukan permainan, uji sensitivitas dan latihan.

6. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sedangkan aturan adalah sesuatu tindakan yang telah ditetapkan untuk dijalankan. Bagi setiap instansi biasanya memiliki pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam perusahaan salah satunya aturan akuntansi mengenai kegiatan akuntansi. Aturan akuntansi disusun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahunan. Dalam dasar akuntansi memiliki aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan oleh (IAI).

Bisa disimpulkan bahwa pengertian dari ketaatan aturan akuntansi ketentuan atau aturan akuntansi yang wajib ditaati oleh organisasi dalam pengelolaan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan akurat. Adanya aturan akuntansi tersebut dapat menghindari tindakan menyimpang yang merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan

akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Menurut Prekanida (2015:57) ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundangundangan.
2. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi untuk pelaporan keuangannya.

Menurut Suwarianti dan Sumadi (2020) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil.

4. Obyektifitas

Obyektifitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai dari jasa yang diberikan pada anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kehati-hatian

Kehati-hatian mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya secara profesional dengan kompetensi dan ketekunan. Dengan hal ini anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang didapat selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan

8. Standar Teknis

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, IFAC, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Secara teoretis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor.

7. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa yang diberikan kepada organisasi ataupun instansi. Menurut Norainun (2020) kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari

pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Dan dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah imbalan atau balas jasa dari pekerjaan yang dilakukan berupa uang, gaji, upah, bonus, atau insentif kepada pegawainya.

Pemberian kompensasi harus ditetapkan sesuai asas adil dan asas layak dan wajar. Menurut Ernawati et al. (2020) antara lain:

1. Asas Adil

Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus diseimbangkan dengan seberapa besar prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggungjawab, jabatan pekerjaan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang lebih baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik.

2. Asas Layak dan Wajar.

Kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal

Kesesuaian kompensasi dapat diartikan sebagai persepsi pegawai tentang kesesuaian imbalan atau gaji yang didapatkan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Kompensasi yang diperoleh oleh pegawai harus sesuai dengan kontribusi pegawai terhadap organisasi. Sehingga pegawai akan merasa puas dan memotivasi pegawai untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. dapat disimpulkan pentingnya

pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai untuk mengurangi terjadinya kecurangan.

Terdapat tiga komponen kompensasi langsung yang biasanya diterima oleh karyawan dalam seperti dalam bentuk gaji, upah, insentif, bonus sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diterima oleh karyawan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Untuk mengukur kesesuaian kompensasi, kompensasi langsung harus menunjukkan bahwa gaji, upah atau insentif yang telah sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan instansi. Selain itu karyawan berhak atas kompensasi tidak langsung berupa asuransi, tunjangan atau uang pensiun sebagai kompensasi tidak langsung yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Pengendalian internal merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses manajemen, karena konsep pengendalian internal dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengendalian internal diterapkan dalam organisasi maupun instansi untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Dewi et al. (2017) dengan memaksimalkan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan akuntansi serta mendeteksinya lebih awal. pengendalian itu sendiri diartikan sebagai suatu keberhasilan dari strategi atau tindakan perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menjaga

pelaporan keuangan perusahaan, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan perusahaan serta menjaga ketaatan instansi pemerintahan terhadap hukum dan peraturan yang ada.

Menurut teori *fraud triangle*, penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya peluang. Keberadaan pengendalian internal akan mengurangi *opportunity* atau peluang seseorang untuk bertindak kecurangan. Dengan demikian pencegahan kecurangan dapat dideteksi dan di atasi sedini mungkin dengan adanya pengendalian internal yang memadai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zarlis (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

2.3.2 Pengaruh Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Pengembangan mutu karyawan berarti menjelaskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Menurut Lubis et al. (2016) pengembangan mutu karyawan bertujuan mendorong karyawan bekerja lebih baik sekaligus berusaha memiliki tingkat moral tinggi supaya tugas yang di kerjakan dapat efisien. Menurut teori *fraud triangle*, penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya tekanan. Keberadaan pengembangan mutu karyawan akan mencegah seseorang untuk bertindak curang. Pengembangan mutu karyawan yang efisien menurunkan adanya tekanan dalam tindak kecurangan sebab segala apa yang diperlukan terpenuhi dengan baik. Pengembangan mutu karyawan berarti menyangkut usaha-usaha meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahlian atau keterampilannya. Pengembangan mutu karyawan dimaksudkan untuk mendorong

karyawan bekerja lebih keras dan baik, berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi dan karenanya akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al. (2021) menjelaskan bahwa pengembangan mutu karyawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

2.3.3 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Menurut Shintadevi (2015) Ketaatan aturan akuntansi merupakan tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan BPK ataupun SAP.

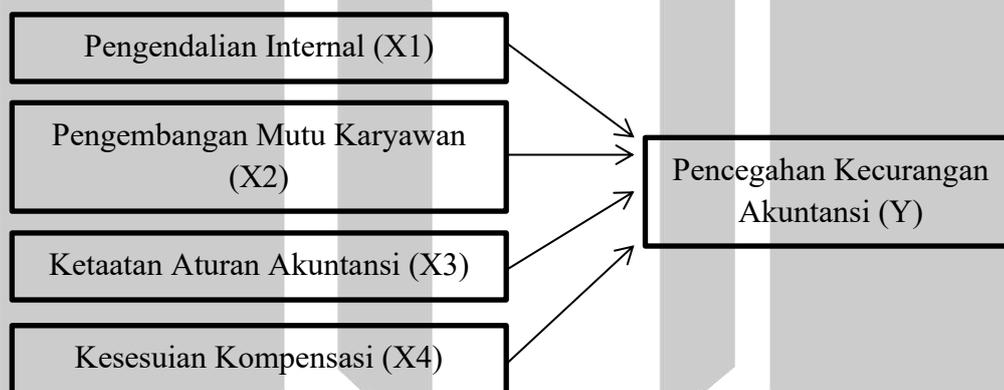
Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, apabila berjalan dengan baik dan lancar akan mampu menghasilkan informasi yang akurat untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Instansi harus menaati segala pedoman dalam mengukur dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dengan begitu pencegahan kecurangan akuntansi pada pegawai terlaksanakan. Menurut teori *fraud triangle* penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya peluang. Keberadaan tingginya ketaatan aturan akuntansi akan mencegah dan meminimalisir peluang seseorang untuk bertindak curang. Sesuai dengan penelitian dari Natasya et al. (2022) bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian tidak ada peluang bagi pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi jika pencegahan yang dilakukan sangat ketat diawal.

2.3.4 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Kesesuaian kompensasi merupakan hasil yang diterima pegawai atas apa yang telah dikerjakan sehingga mampu membuat pegawai merasa puas. Dengan demikian, pencegahan kecurangan akuntansi atau deteksi awal agar tidak terjadinya kecurangan dan tidak akan merugikan instansi tempat bekerja. Menurut teori *fraud triangle*, penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya rasionalisasi yang dibenarkan. Dengan kesesuaian kompensasi yang memadai akan mencegah seseorang untuk tidak bertindak kecurangan. Sesuai dengan hasil penelitian dari Indria et al. (2014) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar penelitian tersebut, maka penelitian ini menguji pengendalian internal, pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan

akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- H1: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi
- H2: Pengembangan mutu karyawan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi
- H3: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi
- H4: Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi